

**Analysis of Village Financial Statement Presentation in accordance
with Government Accounting Standards (SAP)
(Case Study in Waluran Village, Waluran District)**

**Analisis Penyajian Laporan Keuangan Desa Sesuai Dengan Standar
Akuntansi Pemerintah (SAP)
(Studi Kasus pada Desa Waluran Kecamatan Waluran)**

Ramli Pratama ¹⁾; Idang Nurodin ²⁾; Andri Indrawan³⁾

Study Program Of Accounting, Faculty Of Economic, Universitas Muhammadiyah Sukabumi

Email: 1) ramlipratama120200@gmail.com; 2) idangnurodin@ummi.ac.id; 3) andriindrawan@ummi.ac.id

ARTICLE HISTORY

Received [02 March 2024]
Revised [18 April 2023]
Accepted [22 April 2024]

KEYWORDS

*Financial Statements,
Government Accounting
Standards, Desa Waluran*

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Untuk menganalisis penyajian laporan Keuangan Desa Waluran Kecamatan Waluran yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), 2) Untuk menganalisis upaya yang dapat dilakukan supaya penyajian laporan Keuangan Desa Waluran Kecamatan Waluran sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), dan 3) Untuk mendeskripsikan kendala yang dihadapi dalam penyajian laporan Keuangan Desa Waluran yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah. penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode kualitatif dengan memakai pendekatan deskriptif, menggunakan Teknik pengambilan data yang meliputi: observasi, wawancara dan dokumentasi serta menggunakan Teknik analisis data model Miles dan Huberman yang meliputi: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan pengambilan kesimpulan.

Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Penyajian laporan Keuangan Desa Waluran Kecamatan Waluran belum sepenuhnya sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah, Desa Waluran hanya menyajikan laporan realisasi anggaran saja. Sedangkan komponen laporan Keuangan yang harus disajikan menurut Standar Akuntansi Pemerintah yaitu laporan realisasi anggaran, laporan saldo anggaran lebih, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas serta catatan atas laporan Keuangan, 2) Upaya yang dapat dilakukan supaya penyajian laporan Keuangan Desa Waluran sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku diantaranya adalah: a) Menaikan taraf/kompetensi sumber daya manusia, b) Mengadakan seminar/pelatihan, c) Menempatkan Pegawai sesuai dengan Kompetensinya, 3) Kendala dalam penyajian laporan Keuangan Desa Waluran sesuai dengan standar akuntansi pemerintah, yaitu sebagai berikut: a) Relevansi atau kesesuaian jurusan, b) Kompetensi sumber daya manusia, dan c) Kurangnya informasi.

ABSTRACT

The objectives of this study are as follows: 1) To analyze the presentation of the Financial statements of Waluran Village in accordance with Government Accounting Standards (SAP), 2) To analyze efforts that can be made so that the presentation of the Financial statements of Waluran Village Waluran District is in accordance with Government Accounting Standards (SAP), and 3) To describe the obstacles faced in the presentation of Waluran Village Financial statements in accordance with Government Accounting Standards. This research is a research that uses qualitative methods using a descriptive approach, using data collection techniques which include: observation, interviews and documentation and using Miles and Huberman model data analysis techniques which include: data collection, data reduction, data presentation and conclusion making.

The results of this study show that: 1) The presentation of the Financial statements of Waluran Village, Waluran District, is not fully in accordance with Government Accounting Standards, Waluran Village only presents budget realization reports. While the components of the Financial statements that must be presented according to Government Accounting Standards are budget realization reports, excess budget balance reports, operational reports, cash flow statements, statements of changes in equity and notes to the Financial statements, 2) Efforts that can be made so that the presentation of Waluran Village Financial statements in accordance with applicable accounting standards include: a) Raising the level / competence of human resources, b) Conducting seminars/training, c) Placing Employees in accordance with their Competence, 3) Constraints in presenting Waluran Village Financial statements in accordance with government accounting standards, which are as follows: a) Relevance or suitability of majors, b) Human resource competence, and c) Lack of information.

This is an open access article
under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



PENDAHULUAN

Berdasarkan UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah tertentu dan berwenang di dalamnya dalam menjalankan

pemerintah, kepentingan masyarakat sesuai dengan kesepakatan dari ide masyarakatnya, hak atas asal usul masyarakat setempat yang diakui dan di hormati dalam sistem Pemerintahan NKRI. Untuk mewujudkan tujuan dari sebuah desa tentunya di butuhkan perwakilan dari desa maupun dari pemerintah daerah yang di sebut dengan perangkat atau aparatur desa. Sebagai suatu bentuk pertanggungjawaban atas seluruh program kegiatannya, pemerintah memiliki kewajiban untuk menyusun laporan keuangan. Hal ini dimaksudkan agar dapat memperlihatkan transparansi atas penggunaan dana publik oleh entitas pemerintah. Undang-Undang No 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, yang mengatur segala bentuk pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan.

Laporan keuangan adalah laporan yang tersusun tentang posisi keuangan dan transaksi yang di jalankan oleh entitas pelapor merupakan laporan keuangan menurut Peraturan Pemerintah Nomer 71 Tahun 2010 mengenai Standar Laporan keuangan adalah laporan yang tersusun tentang posisi keuangan dan transaksi yang di jalankan oleh entitas pelapor merupakan laporan keuangan menurut Peraturan Pemerintah Nomer 71 Tahun 2010 mengenai Standar Akuntansi Pemerintah. Sebagai amanat dari Undang-Undang (UU) No. 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara atau mengisyaratkan reformasi keuangan atau daerah dalam rangka mewujudkan good governance pada pemerintah pusat maupun daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah menerbitkan undang-undang baru, yaitu Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, untuk meningkatkan efektivitas dan memudahkan pengawasan serta pertanggungjawaban keuangan daerah. Hingga diterbitkannya Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan desa, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa. langsung dengan masyarakat dengan berbagai macam latar belakang Desa merupakan unit organisasi pemerintahan yang berhadapan secara kepentingan dan kebutuhannya memiliki peranan yang sangat penting, khususnya pada pelaksanaan tugas dibidang politik. Desa memiliki kewenangan untuk mengurus tata pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan secara mandiri dan transparan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa.

Pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan desa diwujudkan dalam untuk meningkatkan laporan keuangan pemerintahan desa. Terkait hal tersebut, pemerintah mengacu pada Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang desa, dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan desa yang transparan dan bertanggungjawab, melakukan pembinaan dan pengawasan dengan memberikan pedoman dan standar pelaksanaan penyelenggaraan atahan desa. Agar keterangan keuangan pemerintahan desa dapat dipertanggungjawabkan secara memadai, Standar Akuntansi Pemerintahan Desa digunakan sebagai acuan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintahan desa. Hal ini dilakukan guna menjamin kualitas laporan keuangan desa yang baik dan transparan. Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) yang independen bertanggung jawab dalam menyusun Standar Akuntansi Pemerintahan Desa (SAP Desa), yang kemudian ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Sebelum ditetapkan, SAP Desa juga mendapat pertimbangan dari Badan Pemeriksa Keuangan untuk memastikan kualitas dan keakuratan standar tersebut. Penyusunan SAP Desa dilakukan oleh KSAP melalui proses baku penyusunan (due process). Proses pertanggungjawaban baku penyusunan profesional SAP KSAP tersebut.

Dana desa menjadi alasan pentingnya akuntabilitas dan transparansi keuangan desa. Oleh karena itu, Standar Akuntansi Pemerintah Desa dibuat sebagai upaya memenuhi kebutuhan tersebut. Standar tersebut berfungsi sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintahan desa dan memastikan transparansi dan akuntabilitas yang lebih baik." Laporan keuangan merupakan salah satu produk yang dihasilkan oleh disiplin ilmu akuntansi, dan menjadi bentuk pertanggungjawaban, penyajian laporan keuangan juga harus memenuhi prinsip akuntansi yang berlaku umum dan disajikan secara wajar".

Proses pelaksanaan penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan di desa menjadi topik menarik untuk diteliti lebih lanjut. Hal ini disebabkan oleh perbedaan sumber daya manusia yang dimiliki oleh masing-masing desa sehingga dapat mempengaruhi proses pelaksanaan atau penerapan standar akuntansi. Perbedaan ini dapat menjadi kelebihan atau kelemahan tersendiri bagi suatu desa.

Desa Waluran Kecamatan Waluran terletak di Kabupaten Sukabumi dengan kantor desa yang berlokasi strategis di tepi jalan raya. Seperti desa lainnya di Indonesia, Desa Waluran menerima dana dari APBN yang berdampak pada peningkatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). Karena hal ini, diperlukan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel, serta pelaporan yang tepat agar dapat memenuhi standar akuntansi yang telah ditetapkan.

Realitanya, masih ada desa yang belum menyajikan laporan keuangannya sesuai dengan Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP), padahal SAP di terbitkan supaya menjadi aturan desa dalam menyajikan laporan keuangan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Banyaknya desa yang belum menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah mengindikasikan bahwa desa telah memiliki laporan keuangan akan tetapi

kualitas laporan keuangan desa belum kredibel dan transparan. Oleh karena itu, penerapan Standar Akuntansi Pemerintah pada desa sangat penting untuk di terapkan.

LANDASAN TEORI

Pengertian Akuntansi

Menurut Sastroatmodjo & Purnairawan (2021), Akuntansi dapat didefinisikan sebagai sebuah siklus atau alur yang meliputi pencatatan, penggolongan, serta pengikhtisaran akan transaksi keuangan yang terjadi secara sistematis, akurat dan sesuai dengan standar atau prosedural yang berlaku. Kemudian disajikan dalam bentuk laporan keuangan, dengan tujuan agar dapat dijadikan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan bagi pihak-pihak yang mempunyai kepentingan.

Akuntansi dapat didefinisikan sebagai sebuah alur proses pencatatan, pengidentifikasian, penggolongan serta pengikhtisaran transaksi-transaksi Ekonomi yang bisa memberikan informasi kuantitatif yang akurat dan bisa dijadikan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan (Ruci & Prasetyo, 2022).

Entitas Akuntansi dan Pelaporan

Menurut Pemerintah (2021), sebagai sebuah entitas Akuntansi yang merupakan unit pada pemerintahan yang mengatur anggaran, kekayaan, dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan Keuangan atas dasar akuntansi yang diselenggarakannya. Kemudian sebagai sebuah entitas pelaporan, Entitas pelaporan merupakan unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang berdasarkan prosedural atau berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, entitas tersebut wajib menyajikan laporan pertanggungjawaban, berupa laporan keuangan yang bertujuan umum, yang terdiri dari: Pemerintah pusat;Pemerintah daerah;Masing-masing kementerian negara atau lembaga di lingkungan pemerintah pusat.

Peranan Laporan Keuangan

Menurut Pemerintah (2021), Laporan Keuangan disusun untuk menyediakan atau menyajikan informasi yang relevan mengenai posisi keaungan serta seluruh transaksi yang terjadi pada sebuah entitas selamam satu periode. Karena pada dasarnya, Laporan keuangan digunakan untuk mengetahui serta mengonfirmasi nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan. Dengan adanya laporan Keuangan maka proses audit maupun pemeriksaan menjadi lebih mudah serta kredibel.

Pemerintahan

Pemerintah berasal dari suku kata "Perintah" (to order) yang berarti sesuatu yang harus dilaksanakan atau sistem menjalankan wewenang dan kekuasaan mengatur kehidupan sosial, ekonomi dan politik suatu negara atau bagian-bagiannya. Jadi pemerintah adalah badan, organ, atau lembaga yang mempunyai kekuasaan untuk memerintah dalam suatu negara. Sedangkan pemerintahan adalah keseluruhan aktivitas (tugas, fungsi, kewenangan) yang dilaksanakan secara terorganisir oleh badan, organ atau lembaga pemerintah demi tercapainya suatu negara.

Pemerintah menurut Sudiranata adalah organisasi yang mempunyai kekuatan besar dalam suatu negara, mencakup urusan masyarakat, teritorial dan urusan kekuasaan dalam rangka mencapai tujuan negara. Dengan demikian, pada umumnya Pemerintah adalah sekelompok individu yang mempunyai wewenang tertentu untuk melaksanakan kekuasaan atau sekelompok individu yang mempunyai dan melaksanakan wewenang yang sah dan melindungi serta meningkatkan melalui perbuatan dan pelaksanaan berbagai keputusan yang dibuat pemerintah berdasarkan perundangundangan baik tertulis maupun tidak. Pemerintah dalam lingkup pengertiannya dibagi dalam dua jenis yaitu:

- a. Pemerintah dalam arti luas menunjuk pada aktivitas (tugas, fungsi dan kewenangan) yang dilaksanakan secara terorganisir atau terstruktur oleh lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif. Contoh: Presiden, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah, Badan Pemeriksa Keuangan, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial.
- b. Pemerintah dalam arti sempit: menunjuk pada aktivitas (tugas, fungsi dan kewenangan) yang dilaksanakan secara terorganisir khusus oleh lembaga eksekutif.

Standar Akuntansi Pemerintah

Standar Akuntansi Pemerintahan digunakan sebagai suatu pedoman dasar dalam melaksanakan mekanisme akuntansi pemerintah. Pengertian akuntansi menurut *American Accounting Association* (1966) Seperti yang dikutip Abdul Halim dan Muhammad Syam Kusufi (2014), Akuntansi adalah suatu proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari suatu organisasi/entitas yang dijadikan sebagai informan dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukan.

Abdul Halim juga mengutip pengertian Akuntansi menurut Accounting Principles Board (1970), Akuntansi adalah suatu kegiatan jasa yang fungsinya menyediakan informasi kuantitatif, terutama yang bersifat keuangan tentang entitas ekonomi yang dimaksudkan agar berguna dalam pengambilan keputusan ekonomi.

Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dengan demikian, SAP merupakan persyaratan dan dasar yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas pelaporan keuangan pemerintah di Indonesia. 13 Salah satu upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah. Laporan tersebut harus memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintahan yang telah diterima secara umum.

Prinsip Akuntansi Pelaporan Keuangan

Merupakan ketentuan yang harus dipahami serta ditaati oleh para pembuat atau penyusun laporan Keuangan dalam Menyusun standar, penyelenggara akuntansi dan pelaporan Keuangan dalam melakukan kegiatannya, serta para pemangku kepentingan atau penggunaan laporan dalam memahami terkait laporan Keuangan yang disajikan (Pemerintah, 2021).

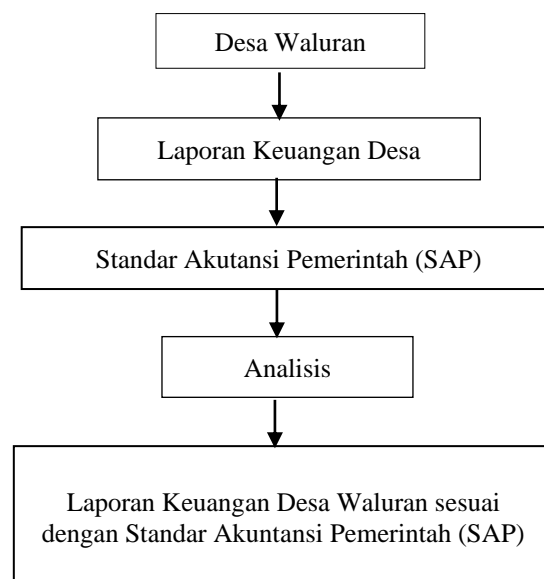
Kendala Informasi yang Relevan dan Andal

Yaitu setiap kondisi tidak memungkinkan terwujudnya situasi yang ideal dalam mewujudkan informasi akuntansi yang relevan dan andal. Hal ini bisa disebabkan oleh keterbatasan (*limitation*) atau karena alasan-alasan kepraktisan (Pemerintah, 2021). Terdapat 3 hal kendala informasi akuntansi serta laporan Keuangan pemerintah, yaitu:

- a. Materialitas
- b. Pertimbangan Biaya dan Manfaat
- c. Keseimbangan Antar Karakteristik Kualitatif

Adapun paradigma penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 1. Kerangka Pemikiran



METODE PENELITIAN

Objek Penelitian

Sugiyono (2020:110), Objek Penelitian adalah variasi, atribut, atau dasar yang akan menjadi acuan dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Kemudian dari objek tersebut peneliti akan mendapatkan jawaban dari apa yang sedang diteliti. Dalam penelitian ini, peneliti menjadikan Standar Akuntansi Pemerintah dan Kualitas Laporan Keuangan sebagai objek penelitiannya, karena dengan objek penelitian tersebut maka peneliti akan mengetahui dan akan mendapatkan informasi jawaban dari masalah dan tujuan penelitian.

Metode Penelitian

Menurut Sugiyono (2020:2), Metode Penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dalam penelitian untuk kegunaan tertentu. Metode merupakan cara atau langkah yang ditempuh peneliti dalam melaksanakan penelitiannya. Metode Penelitian yang digunakan peneliti adalah Metode Kualitatif.

Metode Kualitatif merupakan metode yang berlandaskan postpositivisme yaitu sebuah metode yang meneliti objek penelitian secara lebih mendalam dengan realitas yang dinamis dan bersifat interpretif. Kemudian pendekatan yang digunakan menggunakan pendekatan deskriptif yaitu dengan cara menggambarkan permasalahan dengan situasi sosial secara mendalam dan bersifat menyeluruh. Adapun, Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif dengan menggunakan data primer dan sekunder sebagai sumber datanya.

Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2020:104), Pengumpulan data dapat dilakukan dengan berbagai cara, setting dan sumber. Adapun penelitian ini menggunakan pengumpulan data dengan menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder.

Teknik Analisis Data

Menurut Sugiyono (2020:129), analisis data dalam penelitian kualitatif adalah dilakukan sejak peneliti sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan dan setelah dari lapangan. Namun, dalam penelitian kualitatif lebih difokuskan selama proses di lapangan bersamaan dengan pengumpulan data..

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Hasil Penelitian

Peneliti melakukan penelitian yang berlokasi di Kp. Giri Raya Desa Waluran Kecamatan Waluran, kemudian peneliti mengambil data dengan triangulasi data sesuai dengan istilahnya triangulasi data mempunyai 3 cara dalam proses pengambilandata yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian merupakan hasil dari uraian observasi, wawancara dan dokumentasi yang telah dilakukan oleh peneliti. Dalam proses observasi peneliti melihat secara langsung kesesuaian antara penyajian lapran Keuangan yang disajikan oleh instansi terkait yaitu Desa Waluran Kecamatan Waluran.

Peneliti telah melakukan wawancara dengan 5 orang pegawai Desa (pegawai yang relevan dengan permasalahan yang hendak diteliti) sehingga menghasilkan hasil dan data yang sesuai serta menjawab rumusan masalah berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan. Dengan cara mewawancarai secara langsung narasumber tersebut, maka kredibilitas data yang didapatkan oleh peneliti menjadi lebih terpercaya. Kemudian untuk dokumenatsi peneliti juga telah mengambil informasi dari laporan Keuangan Desa Waluran Kecamatan Waluran yang peneliti jadikan sebagai kajian literatur yang nantinya dapat membantu jaminan keakuratan data yang diperoleh. Selain itu, dalam proses dokumentasi peneliti menjadikan foto serta bukti wawancara sebagai data pendukung. Adapun 5 Narasumber yang telah peneliti wawancarai yaitu:

Tabel 1. Profil Narasumber/Informan

No	Nama	Jabatan
1.	Dudi Rusdianan, S.IP	Kepala Desa Waluran Kecamatan Waluran
2.	Asep Unang	Sekretaris Desa
3.	Eje Jaenudin	Kasi Pelayanan
4.	Restiani	Kepala Urusan Keuangan
5.	Abdillah	Pegawai Desa

Sumber: Diolah oleh Peneliti

Penyajian Laporan Keuangan Desa Waluran Kecamatan Waluran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, penyajian laporan Keuangan Desa Waluran Kecamatan Waluran belum sepenuhnya sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang berlaku yaitu prosedural dalam menyajikan laporan Keuangan pemerintah desa. Dalam penyajiannya, Pemerintah Desa Waluran Kecamatan Waluran hanya menyajikan satu komponen yaitu laporan realisasi anggaran atau yang sering disingkat LRA. Padahal, komponen penyajian laporan Keuangan bagi instansi umum; pusat maupun daerah, terdapat 6 laporan Keuangan pokok yaitu : Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan SAL), Laporan Posisi Keuangan (Neraca), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), serta Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK), hal ini sepadan dengan Draft Ekspose Standar Akuntansi Pemerintah (Pemerintah, 2021).

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti di Desa Waluran Kecamatan Waluran, seperti yang telah peneliti paparkan bahwa Desa Waluran Kecamatan Waluran dalam penyajian laporan Keuangannya belum sepenuhnya sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang berlaku serta yang menjadi acuan. Dikatakan belum sepenuhnya karena dalam penyajian laporan keuangannya hanya melaporkan satu komponen, sehingga masih ada komponen-komponen yang lain yang tidak dilaporkan atau belum sesuai dengan Standar Akuntansi yang berlaku yaitu Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), seperti komponen laporan keuangan perubahan saldo anggaran lebih, laporan operasional, laporan posisi keuangan, perubahan ekuitas serta catatan atas laporan Keuangan (CALK).

Laporan Realisasi Anggaran (SAP)

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) merupakan komponen laporan keuangan yang harus disajikan dalam laporan keuangan Desa, hal ini didasarkan serta mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Dalam penyajian laporan keuangannya, Desa Waluran telah menyajikan laporan realisasi anggaran pada penyajian laporan keuangannya, hal ini menandakan bahwa dalam hal laporan realisasi anggaran Desa Waluran telah memenuhi salah satu komponen laporan keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Adapun unsur/pos pokok dalam laporan realisasi anggaran diantaranya adalah pendapatan LRA, transfer, belanja serta pembiayaan. Hal ini sepadan dengan yang tercantum pada Standar Akuntansi Pemerintah (Pemerintah, 2021).

Pendapatan

Desa Waluran telah memberikan informasi mengenai pendapatannya secara rinci melalui laporan realisasi anggaran mereka. Pendapatan tersebut terdiri dari pendapatan transfer senilai Rp 1.615.395.898 dengan realisasi sebesar Rp 1.603.343.200, dengan rincian sebagai berikut: dana desa sebesar Rp 926.605.000 dengan realisasi sebesar Rp 926.605.000 kemudian bagi hasil pajak dan retribusi sebesar Rp 101.216.598 dengan realisasi sebesar Rp 89.163.900, alokasi dana desa sebesar 457.574.300 dengan realisasi sebesar Rp 457.574.300, serta bantuan Keuangan dari APBD sebesar Rp 130.000.000 dengan realisasi sebesar Rp 130.000.000.

Belanja

Desa Waluran memberikan informasi nominal jumlah belanjanya yaitu sebesar Rp 1.664.703.307 yang terdiri dari Bidang penyelenggaraan pemerintahan desa sebesar Rp 692.930.923, Bidang pelaksanaan pembangunan desa sebesar Rp 411.655.198, Bidang pembinaan kemasyarakatan sebesar Rp 106.567.686, Bidang pemberdayaan masyarakat Rp 5.000.000, serta Bidang penanggulangan bencana darurat sebesar Rp 448.549.500. sehingga apabila melihat dari jumlah seluruh pendapatan dan jumlah belanja maka Desa Waluran mengalami Defisit sebesar (Rp 49.307.409).

Pembiayaan

Untuk jumlah pembiayaan yang berakhir pada desember 2022 yaitu 51.223.109. sehingga jumlah SiLPA tahun berjalan apabila dilihat dari tahun sebelumnya yaitu Rp Rp 13.289.681.

Apabila dari rinciannya, laporan realisasi anggaran Desa Waluran Kecamatan Waluran dalam komponen ini telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), hanya saja dalam realisasi anggarannya tidak memakai persen (%), akan tetapi hal itu tidak menjadi sebuah permasalahan karena tidak ada peraturan yang baku terkait hal tersebut, ilustrasi yang ada pada Standar Akuntansi Pemerintah tidak bersifat mengikat akan tetapi diharapkan dapat dijadikan sebagai gambaran umum atau acuan bagi entitas atau pelapor dalam menyajikan laporan keuangannya hal ini sepadan dengan yang tercantum dalam draft ekspose Standar Akuntansi Pemerintah (Pemerintah, 2021).

Sehingga apabila diambil sebuah konklusi, maka Laporan Realisasi Anggaran Desa Waluran Kecamatan Waluran telah memenuhi Standar Akuntansi yang berlaku. Walaupun dalam segi unsur pendapatan misalnya, Desa Waluran tidak menginformasikan Pendapatan LRA akan tetapi Langsung ke

Transfer. Hal ini mengindikasikan bahwa pendapatan yang dimiliki oleh Desa Waluran adalah dari Dana Transfer tersebut.

Laporan Saldo Anggaran Lebih (Laporan SAL)

Desa Waluran Kecamatan Waluran belum menyajikan laporan saldo anggaran lebih, mereka hanya mengacu pada laporan realisasi anggaran yang telah mereka sajikan. Padahal, dalam komponen pokok laporan Keuangan menurut Standar Akuntansi Pemerintah, laporan saldo anggaran lebih termasuk ke dalam komponen laporan Keuangan yang harus disajikan. Oleh karena itu dalam segi komponen laporan Keuangan, Desa Waluran Kecamatan Waluran belum sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

Berikut dilampirkan format Laporan Saldo Anggaran Lebih (SAL) untuk Desa Waluran Kecamatan Waluran:

Tabel 2. Laporan Saldo Anggaran Lebih Desa Waluran

LAPORAN SALDO ANGGARAN LEBIH PEMERINTAH DESA WALURAN Untuk Tahun yang Berjalan 2022	
Uraian	2022
Saldo Anggaran Lebih Awal	-
Pengguna SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Berjalan	-
Sisa Lebih Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) (dari LRA)	(Rp 13.289.681)
Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	-
Lain-lain	-
Saldo Anggaran Lebih Akhir	(Rp 13.289.681)

Sumber: Diolah oleh Peneliti

Sisa Lebih Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) didapat dari laporan realisasi anggaran yaitu didapat dari selisih antara anggaran serta realisasi pada tahun yang berjalan yaitu sebesar (Rp 13.289.681).

Neraca

Dalam laporan posisi Keuangan atau neraca, Desa Waluran Kecamatan Waluran belum melaporkan laporan posisi Keuangan mereka. Padahal dalam komponen laporan Keuangan menurut Standar Akuntansi Pemerintah, komponen laporan posisi Keuangan seharusnya dilaporkan serta disajikan sehingga dapat memberikan informasi yang valid terkait aset yang dimiliki berupa tanah, bangunan, kendaraan dan lain sebagainya; informasi mengenai liabilitas atau kewajiban serta informasi mengenai ekuitas yang dimiliki. Oleh karena itu dalam segi komponen laporan Keuangan, Desa Waluran Kecamatan Waluran belum sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah atau belum sesuai dengan standar yang berlaku.

Berikut dilampirkan format Neraca/posisi laporan Keuangan untuk Desa Waluran Kecamatan Waluran

Tabel 3. Neraca/Laporan Posisi Keuangan

Uraian	31 Desember 2022
ASET	
Aset Lancar	Rp 190.692.591
Aset Tetap	Rp 960.000.000
Investasi jangka panjang	-
Aset Lainnya	-
Jumlah Aset	Rp 1.150.692.591
KEWAJIBAN	
Kewajiban Jangka Pendek	Rp 44.600.000
Kewajiban Jangka Panjang	-
Jumlah Kewajiban	Rp 44.600.000
Ekuitas	(Rp 49.307.409)
Modal Saldo Awal	1.066.200.000
Laba ditahan	Rp 89.200.000
Jumlah Ekuitas	Rp 1.106.092.591
Kewajiban + Ekuitas	Rp 1.150.692.591

Sumber: Diolah oleh Peneliti

Laporan Operasional (LO)

Desa Waluran Kecamatan Waluran Belum menyajikan laporan operasionalnya. Padahal dalam komponen laporan Keuangan menurut standar akuntansi pemerintah laporan tersebut harus disajikan.

Sehingga berdasarkan komponen laporan Keuangan pemerintah Desa Waluran belum sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku yaitu laporan keuangan berdasarkan akuntansi pemerintah.

Berikut dilampirkan format laporan operasional (LO) untuk Desa Waluran Kecamatan Waluran:

Tabel 4. Laporan Operasional Desa Waluran

LAPORAN OPERASIONAL PEMERINTAH DESA WALURAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022	
Uraian	31 Desember 2022
Pendapatan L-O (dari LRA)	Rp 1.615.395.898
Beban (dari LRA)	(Rp 1.664.703.307)
Surplus/Defisit dari Operasi	(Rp 49.307.409)
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional	-
Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa	-
Surplus/Defisit L-O	(Rp 49.307.409)

Sumber: Diolah oleh Peneliti

Pendapatan operasional didapatkan dari data laporan realisasi anggaran yang telah disajikan oleh Desa Waluran, kemudian untuk beban dihasilkan dari beban yang terdapat di laporan realisasi anggaran sehingga didapatkan defisit L-O sebesar (Rp Rp 49.307.409).

Laporan Arus Kas

Desa Waluran Kecamatan Waluran belum menyajikan laporan arus kas dalam penyajian laporan keuangannya, padahal laporan arus kas merupakan salah satu komponen dari Standar Akuntansi Pemerintah yang memang harus disajikan. Sehingga Desa Waluran belum sesuai dengan Standar Akuntansi yang berlaku terkait laporan arus kas yang seharusnya disajikan.

Dalam laporan arus kas terdapat informasi penting yang harus disajikan diantaranya adalah arus kas dari aktivitas operasi, aktivitas investasi serta pendanaan. Arus kas masuk dan keluar yang terjadi dapat memberikan gambaran kas akhir nantinya.

Berikut dilampirkan format laporan arus kas untuk Desa Waluran Kecamatan Waluran

Tabel 5. Laporan Arus Kas

LAPORAN ARUS KAS PEMERINTAH DESA WALURAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022	
Uraian	2022
Arus Kas Pada Aktivitas Operasi	
Arus Kas Masuk:	
Penerimaan Dana Alokasi Khusus (alokasi dana desa)	Rp 457.574.300
Penerimaan Dana Otonomi Khusus (bantuan Keuangan dari APBD provinsi)	Rp 130.000.000
Penerimaan Dana Penyesuaian	-
Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak & Retribusi	Rp 101.216.598
Penerimaan Bagi Hasil Lainnya	-
Penerimaan Hibah Dana Darurat	-
Penerimaan Lainnya (Dana Desa)	Rp 926.605.000
Penerimaan dari Pendapatan Luar Biasa	-
Jumlah Arus Kas Masuk	Rp 1.615.395.898
Arus Keluar Kas:	
Pembayaran Pegawai	Rp 44.600.000
Pembayaran Barang	
Pembayaran Bunga	Rp 132.052
Pembayaran Subsidi	
Pembayaran Hibah	
Pembayaran Bantuan Sosial Tak Terduga	
Pembayaran Bagi Hasil Pajak & Retribusi	Rp 101.216.598
Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan Lainnya (Dana Desa)	Rp 926.605.000
Pembayaran Belanja lainnya	Rp 592.149.657
Jumlah Arus Keluar Kas	Rp 1.664.703.307
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	(Rp 49.307.409)
Arus Kas dari Aktivitas Investasi	
Arus Masuk Kas	
Pencairan Dana Cadangan	-

penjualan atas Tanah	Rp 400.000.000
Penjualan atas Peralatan dan Mesin	Rp 35.000.000
Penjualan atas Gedung dan Bangunan	Rp 250.000.000
Penjualan atas Jalan, Imigrasi dan Jaringan	-
Penjualan Aset Tetap Lainnya	Rp 15.000.000
Penjualan Aset Lainnya	-
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-
Penerimaan Penjualan Investasi Non-Permanen	-
jumlah Arus Masuk Kas	Rp 700.000.000
Arus Keluar Kas	
Pebentukan Dana Cadangan	-
Perolehan Tanah	(Rp 250.000.000)
Perolehan Peralatan dan Mesin	(Rp 10.000.000)
Perolehan Gedung dan Bangunan	(Rp 150.000.000)
Perolehan Jalan, Irigasi Jaringan	
Perolehan Aset Tetap Lainnya	(Rp 50.000.000)
Perolehan Aset Lainnya	
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	
Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen	
Jumlah Arus Kas Keluar Kas	(Rp 460.000.000)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	Rp 240.000.000
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	
Jumlah Arus Kas Masuk	-
Arus Keluar Kas	-
Jumlah Arus Keluar Kas	-
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	
Arus Kas dari Aktivitas Transitoris	-
Arus Masuk Kas	
Jumlah Arus Masuk Kas	-
Arus Keluar Kas	-
Kenaikan/Penurunan Kas	-
Saldo Awal Kas di BUD & Kas di Bendahara Pengeluaran	-
Saldo Akhir Kas di BUD & Kas di Bendahara Pengeluaran	-
Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan	-
Saldo Akhir Kas	Rp 190.692.591
Kenaikan/Penurunan Kas	-

Sumber: Diolah oleh Peneliti

Laporan Perubahan Ekuitas

Dalam penyajian laporan keuangannya, Desa Waluran Kecamatan Waluran belum melaporkan laporan perubahan ekuitas. Padahal laporan perubahan ekuitas merupakan komponen pokok dalam laporan Keuangan suatu instansi pemerintah menurut Standar Akuntansi Keuangan Pemerintah. di dalam laporan perubahan ekuitas memberikan informasi mengenai perubahan ekuitas/modal baik berupa penambahan/surplus atau pengurangan/defisit dari laporan operasional sehingga pembaca laporan Keuangan dapat melihat serta mengetahui dengan jelas ekuitas yang dimiliki oleh suatu entitas. Berikut dilampirkan format laporan perubahan ekuitas untuk Desa Waluran Kecamatan Waluran:

Tabel 6. Laporan Perubahan Ekuitas

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS PEMERINTAH DESA WALURAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022	
Uraian	2022
Ekuitas Awal	-
Surplus/Defisit L-O (dari Surplus/Defisit dari Laporan Operasional)	(Rp 49.307.409)
Dampak Kumulatif Perubahan	-
Kebijakan/Kesalahan Mendasar	-
Koreksi Nilai Persediaan	-
Selisih Revaluasi Aset Tetap	-
Lain-lain	-
Ekuitas Akhir	(Rp 49.307.409)

Sumber: Diolah oleh Peneliti

Catatan Atas Laporan Keuangan

Desa Waluran Kecamatan Waluran dalam penyajiannya belum menyajikan catatan atas laporan keuangannya. padahal secara prosedural, laporan ini harus disajikan agar memuat keterangan mengenai setiap kebijakan akuntansi yang dipakai oleh sebuah entitas pelapor. Berikut dilampirkan contoh format Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK):

Table 7. Upaya yang Dapat Dilakukan Supaya Penyajian Laporan Keuangan Desa Waluran Sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DESA WALURAN 31 Desember 2022	
1. UMUM	Desa Waluran Kecamatan Waluran merupakan salah satu desa yang berada di kecamatan Waluran yang terletak didaerah Giri Raya dengan jumlah penduduk 6.849 jiwa.
2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi	Kebijakan akuntansi yang ada di Desa Waluran Kecamatan Waluran adalah sebagai berikut:
a. Penyajian laporan keuangan	Dalam penyajiannya, Desa Waluran Kecamatan Waluran menggunakan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dalam penyajian laporan keuangannya. Hal ini sesuai dengan prosedural bahwa entitas pemerintah atau sector publik harus mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintah
b. Pencatatan atau pelaporan	Pencatatan atau pelaporan keuangan dicatat dan dilaporkan per-siklus akuntansi atau per periode akuntansi.
3. Penjelasan pos-pos tertentu	
a. Laporan Realisasi Anggaran	Dalam pencatatannya menggunakan basis kas, sehingga pengakuannya dilakukan Ketika ada penambahan kas yang masuk berupa anggaran dalam pendapatannya. Kemudian untuk belanja atau biaya dicatat menggunakan metode basis akrual seperti gaji atau belanja pegawai.akan tetapi ada juga beberapa pos yang menggunakan basis kas seperti belanja barang dan jasa atau peralatan lainnya.
b. Laporan Saldo Akhir Lebih	Dalam pencatatannya diambil dari informasi Laporan Realisasi Anggaran yaitu pada hasil SiLPA/SiKPA
c. Laporan Operasional	Laporan operasional diambil dari aktivitas operasional yaitu diambil dari akumulasi pendapatan dan belanja atau akumulasi beban yang berasal dari laporan realisasi anggaran. Berikut rinciannya :
	Pendapatan L-O (dari LRA) Rp 1.615.395.898
	Beban (dari LRA) <u>(Rp 1.664.703.307)</u>
	Surplus/Defisit dari Operasi (Rp 49.307.409)
	Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional -
	Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa -
	(Rp 49.307.409)
d. Laporan Perubahan Ekuitas	Laporan ini menggambarkan ekuitas yang dimiliki, kemudian defisit atau surplus dari laporan operasional menjadi pengurang.

a. Menaikan Taraf/ Kompetensi Sumber Daya Manusia

Dalam mencapai sebuah hasil yang maksimal tentu sumber daya manusia merupakan hal yang paling utama dan pasti menjadi sebuah sorotan yang optimal. Hal ini terjadi karena sumber daya manusia sangat berbanding lurus atau erat kaitannya dengan kompetensi yang dimiliki oleh setiap individu. Apabila sumber daya manusia sudah mumpuni, maka sudah pasti kompetensi yang dimiliki akan mumpuni juga. Dalam penyajian laporan Keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah, diperlukan orang yang kompeten dalam bidangnya sehingga dalam penyesuaiannya akan menjadi lebih mudah; Lebih efisien serta lebih efektif. Berdasarkan alasan tersebut maka menaikan taraf sumber daya manusia menjadi sebuah keharusan apabila penyajian laporan Keuangan di Desa Waluran ingin sesuai dengan Standar yang berlaku. Salah satu cara dalam menaikan taraf sumber daya manusia adalah tingkat Pendidikan. Tingkat Pendidikan ini akan sangat berpengaruh dalam menaikan sumber daya manusia. Kemudian hal ini akan berpengaruh juga terhadap kompetensi yang dimiliki kemudian akan berpengaruh juga pada kinerja yang dihasilkan.

b. Mengadakan Seminar atau Pelatihan

Pelatihan atau bisa juga dalam bentuk seminar sangat diperlukan dalam membuka wawasan serta pengetahuan para pegawai, khususnya pegawai yang mempunyai jobdesk pada bagian Keuangan atau sejenisnya. Dengan adanya pelatihan, akan menjadikan para pegawai mendapatkan prosedural yang up to date atau terbaru mengenai pengembangan standar Keuangan yang berlaku di Indonesia. Kemudian dengan adanya pelatihan maka skil dari setiap individu pegawai akan menjadi lebih

- terasa kemudian terbiasa. Hal ini tentu adalah upaya yang dapat dilakukan supaya menyajikan laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah akan menjadi semakin mudah.
- c. Menempatkan Pegawai sesuai dengan Kompetensi
Hal ini menjadi hal yang sangat krusial bagi para pemimpin dalam melihat kompetensi yang dimiliki oleh setiap pegawainya. Apabila seorang pegawai ditempatkan sesuai dengan kompetensi atau kualifikasinya, maka tentu kinerjanya juga akan lebih optimal. Seperti contohnya seorang pegawai dengan kompetensi atau kualifikasi bidang Pendidikan akan tetapi ditempatkan di bidang Keuangan. Hal itu merupakan kesalahan yang cukup fatal. Sehingga ketepatan dalam menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensinya akan sangat mempengaruhi dalam upaya menyajikan laporan Keuangan Desa sesuai dengan standar yang berlaku.

Kendala dalam Penyajian Laporan Keuangan Desa Waluran sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah

- a. Relevansi atau Kesesuaian Jurusan
Kendala ini merupakan kendala yang sangat krusial dan signifikan dalam penyajian laporan Keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah, mengingat jurusan seorang pegawai dalam bidang ilmu tertentu akan sangat menentukan kinerja yang dihasilkan. Hal ini dibuktikan dengan beberapa pengelola bagian Keuangan Desa Waluran yang tidak sesuai dengan jurusan yang mereka geluti pada saat kuliah. Sehingga menjadikan kendala tersendiri bagi Desa Waluran dalam menyajikan laporan keuangannya.
- b. Kompetensi Sumber Daya Manusia
Kompetensi akan sangat menentukan baik atau kurang baiknya suatu kinerja sehingga hal ini menjadi kendala yang sangat mempengaruhi dalam penyajian laporan Keuangan di Desa Waluran. Jika diilustrasikan, kompetensi merupakan kunci agar tercapainya sebuah target yang ditentukan. Dalam penyajian laporan Keuangan desa yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah, tentu kompetensi ini menjadi kendala yang cukup signifikan dalam merealisasikan penyajian laporan Keuangan Desa Waluran agar sesuai dengan Standar atau prosedural yang berlaku.
- c. Kurangnya Informasi dan Media Pelatihan
Dalam sesi wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti, masih banyak pegawai desa yang tabu dengan istilah Standar Akuntansi terlebih Standar Akuntansi Pemerintah, hal ini tentu menjadi kendala tersendiri bagi Desa Waluran dalam menyajikan laporan Keuangan mereka agar sesuai dengan standar yang berlaku.

KESIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan, serta didasarkan pada penelitian yang telah peneliti lakukan di lapangan, maka peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penyajian laporan Keuangan Desa Waluran Kecamatan Waluran belum sepenuhnya sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah, Desa Waluran hanya menyajikan laporan realisasi anggaran saja. Sedangkan komponen laporan Keuangan yang harus disajikan menurut Standar Akuntansi Pemerintah yaitu laporan realisasi anggaran, laporan saldo anggaran lebih, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas serta catatan atas laporan Keuangan. Sedangkan yang dilaporkan oleh Desa Waluran hanya satu yaitu laporan realisasi anggaran. Jadi bisa disimpulkan bahwa Desa Waluran Kecamatan Waluran belum sepenuhnya sesuai dengan standar akuntansi pemerintah.
2. Upaya yang dapat dilakukan supaya penyajian laporan Keuangan Desa Waluran sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku diantaranya adalah:
 - a. Menaikan taraf/kompetensi sumber daya manusia
Dengan menaikkan taraf/kompetensi sumber daya manusia maka akan berpengaruh juga terhadap kinerja yang dihasilkan sehingga dapat membantu Desa Waluran dalam menyajikan laporan keuangannya sesuai dengan Standar Akuntansi yang berlaku.
 - b. Mengadakan seminar/pelatihan
Dengan mengadakan seminar atau pelatihan, diharapkan dapat menambah wawasan khususnya mengenai standar akuntansi pemerintah sehingga penyajian laporan keuangannya bisa sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.
 - c. Menempatkan Pegawai sesuai dengan Kompetensinya
Hal ini dapat lebih efektif dan efisien karena dapat memberikan kinerja yang lebih baik, karena sesuai dengan kompetensi dan keahliannya.

3. Kendala dalam penyajian laporan Keuangan Desa Waluran sesuai dengan standar akuntansi pemerintah, yaitu sebagai berikut:
 - a. Relevansi atau kesesuaian jurusan
Hal ini menjadi sangat berpengaruh karena dapat berpengaruh terhadap kinerja yang dihasilkan nantinya khususnya dalam penyajian laporan Keuangan.
 - b. Kompetensi sumber daya manusia
Dalam aspek ini tentu menjadi hal yang sangat krusial karena pasti akan sangat berpengaruh nantinya dalam penyajian laporan Keuangan yang sesuai
 - c. Kurangnya informasi
Hal ini menjadi kendala yang signifikan karena bagaimana akan menyajikan laporan Keuangan sesuai dengan standar yang berlaku, jika belum mengetahui standar yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Aminy, R., Pituringsih, E., & Widiastuty, E. (2021). Analisis Penerapan Good Governance, Standar Akuntansi Pemerintahan, dan Sistem Akuntansi Instansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Valid: Jurnal Ilmiah*, 18(2), 136–147. <https://doi.org/10.53512/valid.v18i2.181>
- Az-Zahra1, S. F., Nurbaiti, & Syafina, L. (2023). 1, 2, 3. 9(1), 146–167. Cahyani, S., & Sinarwati, N. K. (2021). Analisis Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik Pada Badan Usaha Milik Desa Selat. *Jurnal Akuntansi Profesi*, 12(2), 331. <https://doi.org/10.23887/jap.v12i2.35768>
- Khasanah, U., & Nilasari, A. P. (2023). Analisis Implementasi Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan.
- Pemerintah, K. S. A. (2021). *Standar Akuntansi Pemerintah, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Lampiran II.08-PSAP-07 tentang Akuntansi Aset Tetap*. 71, 161–170. <https://www.ksap.org/sap/wp-content/uploads/2021/07/Buku-SAP-2021-1.pdf>
- Samaliwu, T. H. (2022). Analisis Penerapan Akuntansi Pemerintah Daerah Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah Kota Tomohon. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum* ..., 5(2), 1065–1072. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lppmekosobudkum/article/view/4028>
- Sugiyono. (2020). *METODE PENELITIAN KUALITATIF, KUANTITATIF DAN CAMPURAN (MIXED METHOD)* (M. Dr. Ir Sutopo (ed.); 1st ed.).
- ALFABETA.
- Schmidhuber, L., Hilgers, D., & Hofmann, S. (2022). International Public Sector Accounting Standards (IPSASs): A systematic literature review and future research agenda. *Financial Accountability and Management*, 38(1), 119–142. <https://doi.org/10.1111/faam.12265>.
- Transekonomika: Akuntansi, Bisnis Dan Keuangan*, 3(1), 279–288. <https://doi.org/10.55047/transekonomika.v3i1.381>
- Thoyib, M., Satria, C., Septiana, S., & Amri, D. (2020). Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Pada Kecamatan Betung Kabupaten Banyuwangi). *Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 5(2), 13–30. <https://doi.org/10.36908/esh.v5i2.122>
- Wahyuni, T. (2016). Analisis Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (Sapp) Di Kantor Akuntansi Regional Jakarta. *Jurnal Vokasi Indonesia*, 1(2). <https://doi.org/10.7454/jvi.v1i2.12>
- Yahya, I., Hasibuan, R. P. S., Torong, Z. B., & Muda, I. (2018). Factors that influence success implementation of government accounting standard (SAP) based on acrual in the government of the districts/cities in North Sumatera Province. *Journal of Management Information and Decision Sciences*, 21(1), 1–14.
- Pemerintah, K. S. A. (2021). *Standar Akuntansi Pemerintah, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Lampiran II.08-PSAP-07 tentang Akuntansi Aset Tetap*. 71, 161–170. <https://www.ksap.org/sap/wp-content/uploads/2021/07/Buku-SAP-2021-1.pdf>
- Ruci, D., & Prasetyo, H. (2022). Penerapan Pedoman Akuntansi Pesantren di Pondok Pesantren Al I'tishom Kubu Raya. *Jurnal Akuntansi Kompetif*. <https://ejournal.kompetif.com/index.php/akuntansikompetif/article/view/1168>
- Santi, N. (2016). ANALISIS PELAPORAN KEUANGAN YAYASAN PONDOK PESANTREN BERDASARKAN PEDOMAN AKUNTANSI PESANTREN (Studi. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Sastroatmodjo, S., & Purnairawan, E. (2021). *Pengantar Akuntansi*. books.google.com. https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=BRgcEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=pengertian+n+akuntansi&ots=1-Z2bn_iAC&sig=UUn9VTALDiFkgCavR5cD-3mvLdl